

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA
TERHADAP IMPLEMENTASI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI MENGENAI STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHAAN, DINAS
PEKERJAAN UMUM, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANAKKAN
DAN SKPKD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN)**

TESIS

Oleh :

YONI ELFIS

0821220012



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP
IMPLEMENTASI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN TINGKAT
PEMAHAMAN PEGAWAI MENGENAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHAAN, DINAS
PEKERJAAN UMUM, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANAKKAN DAN SKPKD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN)

Oleh:
Yoni Elfis, S.E., Ak.
0821221012

Dibawah Bimbingan
(DR. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak. dan Suhandi, S.E., M.Si., Ak.)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintah sebagai variabel intervening (studi pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian Peternak dan Perikanan dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan). Penelitian ini juga menjelaskan secara deskriptif bagaimana tingkat pendidikan pegawai, bagaimana pengalaman kerja pegawai, bagaimana tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintah serta bagaimana implementasi proses akuntansi keuangan daerah pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian Peternak dan Perikanan, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Metode yang digunakan adalah metode survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek dan data dokumenter. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber asli yaitu data dari hasil pengamatan langsung dan dokumen-dokumen yang berasal dari aktifitas responden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di SKPD dan di SKPKD dan juga data yang diperoleh dan dikumpulkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel intervening tidak terlalu mempengaruhi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD atau dapat dikatakan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP kurang mampu memediasi hubungan antara pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD. Dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,627 menjelaskan bahwa 62.7% dari variasi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.614 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP dengan implementasi proses AKD. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,377 artinya 37.7% dari variasi implementasi proses AKD bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1999 Pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya perubahan tidak hanya pada pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga pada pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan ditetapkannya 4 (empat) paket Undang-undang: (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keempat paket Undang-undang tersebut juga mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengacu kepada keempat paket Undang-undang tersebut sehingga terdapat keseragaman antara pengelolaan dana APBN dan APBD.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan Atas Laporan Keuangan; dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menindaklanjuti reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan tersebut merupakan sinkronisasi dari berbagai undang-undang tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan (*omnibus regulation*) pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Khusus untuk akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang lebih dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk operasional pada daerah, Departemen Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap implementasi proses AKD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP memiliki pengaruh terhadap implementasi proses AKD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel intervening kurang mampu mempengaruhi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD atau dengan kata lain tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP kurang mampu memediasi hubungan antara pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiani, Sulani Aritonang, dkk. 2007. *Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.5 No.6, 2008.
- Asri, Marwan. 1986. *Pengelolaan Karyawan*. BPFE : Yogyakarta.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Efferin, Sujoko, dkk, 2008. *Metode Penelitian Akuntansi (Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Telaah Kritis – PP No.24 Tahun 2005*, Terbitan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Foster, Bill. 2001. *Pembinaan untuk Peningkatan Kinerja Karyawan*. PPM : Jakarta
- Nordiawan, Deddi, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, cetakkan keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hafiz Tanjung, Abdul, 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah – Akuntansi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Harahap, Sofyan S, 2004. *Teori Akuntansi*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dkk, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.